

Pemerintah Dan DPR Sahkan UU IE-CEPA

Tanggal : Senin , 12 April 2021
 Media : Investor Daily
 Halaman : 9
 Wartawan : sny
 Muatan Berita : Netral
 Narasumber : Muhammad Lutfi (*Menteri Perdagangan*)
 Rubrik : Industries, Trade & Services
 Topik : EFTA

Pemerintah dan DPR Sahkan RUU IE-CEPA

JAKARTA – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang “Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA)”. Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (9/4).

Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) merupakan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan kelompok negara EFTA yang beranggotakan Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss. Sebelumnya, DPR RI telah menyetujui draft RUU tersebut dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah pada 22 Maret 2021 lalu.

“Perjanjian Indonesia dengan negara EFTA merupakan persetujuan ekonomi komprehensif Indonesia yang pertama dengan negara di Eropa. Selain untuk meningkatkan ekspor, investasi dan akses pasar ke benua Eropa, IE-CEPA diharapkan dapat meningkatkan profil dan kampanye positif produk kelapa sawit Indonesia secara global dan mendorong diterimanya standar keberlanjutan untuk kelapa sawit Indonesia (ISPO) oleh Swiss,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dalam rapat paripurna tersebut.

Setelah disahkannya RUU tentang IE-CEPA, lanjut Mendag, pemerintah akan membuat peraturan

pendukung untuk mengimplementasikan IE-CEPA berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait tata cara pengenaan dan penetapan tarif bea masuk, serta Peraturan Menteri Perdagangan terkait ketentuan surat keterangan asal (SKA).

Selain itu, Pemerintah Indonesia perlu segera menyiapkan langkah-langkah strategis lewat upaya koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan IE-CEPA yang ditargetkan pada awal semester II-2021.

“Dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang ini menjadi Undang-Undang, DPR telah melaksanakan amanat konstitusi karena IE-CEPA dan UU Cipta Kerja dapat mendorong transformasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umum, khususnya dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca-Covid-19,” ujar Mendag.

Inisiasi perundingan Indonesia dengan negara-negara EFTA dimulai sejak 2005 melalui pembentukan studi kelayakan bersama, yang dilanjutkan dengan perundingan sejak 2011. Perundingan dihentikan sementara pada tahun 2014 dan diaktifkan kembali pada 2016.

Penandatanganan IE-CEPA dilakukan pada 16 Desember 2018 di Indonesia oleh Menteri Perdagangan Indonesia dan para Menteri yang mewakili negara-negara EFTA. Persetujuan ini mencakup isu perdagangan barang dan jasa, investasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta kerja sama dan pengembangan kapasitas. (sny)